



RANCANGAN RPJM-DESA 2015-2020



DESA LUNTO TIMUR KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA SAWAHLUNTO

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah kepada Allah yang maha kuasa atas segala rahmat, nikmat dan karunianya yang telah diberikan kepada kita semua.

Dan dari rahmat Allah itu kami mencoba menyusun dan membuat Rancangan RPJM-Desa Lunto Timur untuk Tahun 2015-2020, Laporan ini yang berisikan tentang semua kegiatan pembangunan yang direncanakan selama tahun 2015-2020.

Sesungguhnya kami telah berusaha semaksimal mungkin dalam hal untuk kesempurnaan Laporan ini, namun tidak kami pungkiri dan kami sadari ,masih banyak kekurangan dalam laporan ini baik dari segi materi laporan dan lainnya.Oleh karena itu saran serta tegur sapa untuk kesempurnaan Laporan ini kami harapkan sekali dari pihak yang terkait.

Semoga saja apa yang kami laporkan ini ada mamfaatnya serta dapat menjadi tolak ukur untuk perbaikan dan kemajuan Desa Lunto Timur dimasa yang akan datang, amiin yarobbal alamin.

Lunto Timur, Februari 2015

KEPALA DESA LUNTO TIMUR

= A D E P R O N =

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Pengertian

BAB II PROFIL DESA

- 2.1 Kondisi Desa
 - 2.1.1 Sejarah Desa
 - 2.1.2 Demografi Desa
 - 2.1.3 Keadaan Sosial
- 2.2. Kondisi Pemerintahan
 - 2.2.1 Pembagian Wilayah
 - 2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III MASALAH DAN POTENSI

- 3.1 Masalah dan Potensi

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- 4.1 Visi dan Misi
 - 4.1.1 Visi
 - 4.1.2 Misi

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN :

- 1. Tabel Rencana Pembangunan Desa

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, pemerintah dituntut untuk mempunyai Visi dan Misi yang baik atau lebih jelasnya pemerintah Desa harus memiliki perencanaan Strategis yang baik. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.

Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Guna mewujudkan tata kelola pemerintah desa yang baik Kepala Desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa yang disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya dimana Kepala Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa selalu melibatkan lembaga kemasyarakatan desa. Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Desa dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) 5 (Lima) Tahun . Dimana RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan pembangunan di tingkat Kota, karena perencanaan pembangunan Desa dan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan system.

1.2 Tujuan Penyusunan RPJM Desa adalah

1.2.1 Maksud

- a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup desa yang berkesinambungan dalam waktu 5 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Kota Sawahlunto
- b. Sebagai pedoman kegiatan Pembangunan Desa Lunto Timur
- c. Sebagai masukan dalam penyusunan RAPB Desa Lunto Timur

1.2.2 Tujuan

- a. Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan Pembangunan Desa selama 5 Tahun kedepan.
- b. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.
- c. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah.
- d. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.
- e. Dapat lebih menjamin kesinambungan pembangunan.

1.3 Dasar Hukum

Landasan Idiil penyusunan RPJM ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusi adalah UUD 1945. Sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan per-Undang-Undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 16);
20. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 36);
21. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 9);

BAB II PROFIL DESA

2.1 Kondisi Desa

2.1.1 Sejarah Desa

Desa Lunto Timur adalah salah satu Desa dalam Kenagarian Lunto dalam wilayah Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto yang dibagi menjadi dua Desa, diantaranya Lunto Barat dan Lunto Timur, secara umum wilayah Desa Lunto Timur berada pada daerah pebukitan serta lereng-lereng yang lumayan curam, dilihat dari sisi Ekonomi penduduk, pada umumnya Masyarakat Desa Lunto Timur bermata pencaharian sebagai Semi Petani Kebun dan pertanian Padi sawah dan usaha kerajinan tenun songket, dan pada kaki pebukitan dan lereng-lereng tersebut yang bisa dijadikan lahan pertanian seperti Kakao, Karet, Durian, Manggis dan sejenisnya serta lahan untuk pertanian padi sawah.

1. KONDISI GEOGRAFIS

Secara Geografis Desa Lunto Timur dilihat dari beberapa aspek tiunjauan meliputi:

1. Iklim:

- Curah hujan :
- Jumlah bulan hujan : 3 bulan
- Suhu rata-rata harian : 28 – 32C⁰
- Tinggi dari permukaan laut : 500 mdl
- Bentang wilayah :

2. TIPOLOGI

- Desa Kepulauan : • Ya/Tidak
- Desa Pantai / Pesisir : • Ya/Tidak
- Desa sekitar hutan : • Ya/Tidak
- Desa Terisolir : • Ya/Tidak
- Desa perbatasan dengan kabupaten lain : • Ya/Tidak

3. ORBITASI

- Berada di ibu kota kecamatan : • Ya/Tidak
- 8 Km
- ½ Jam
- 12 Km
- 35 menit
- ¼ Jam

- Jarak ke ibu kota kecamatan :
- Lama tempuh ke ibu kota kecamatan :
- Jarak ke ibu kota kabupaten :
- Lama tempuh ke ibu kota kabupaten :
- Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten :

4. Batas Desa :

- Sebelah utara : Desa Kubang Tengah
- Sebelah timur : Desa Kubang Tengah
- Sebelah selatan : Desa Pasar Kubang
- Sebelah barat : Desa Lunto Barat

5. Luas wilayah:

Luas wilayah Desa Lunto Timur adalah :489 Ha yang terdiri dari berbagai jenis tanah yang meliputi:

- a. Tanah Sawah : 41.5 Ha
- b. Tanah darat : 447.5 Ha

2.1.2 Demografi Desa

1. Penduduk menurut kelompok umur

usia (tahun)	laki- laki (orang)	perempua n (orang)
1	23	16
2	15	18
3	18	13
4	11	8
5	11	11
6	17	16
7	10	14
8	22	7
9	7	10
10	14	10
11	10	5
12	11	13
13	18	15
14	17	12
15	0	15
16	11	11
17	14	12
18	12	11
19	11	19
20	16	13
21	17	11
22	16	8
23	7	13
24	11	12
25	13	7
26	13	7
27	16	12
28	8	14

usia	laki- laki (orang)	perempua n (orang)
39	9	4
40	12	9
41	6	3
42	8	6
43	5	6
44	6	9
45	3	10
46	6	6
47	6	5
48	12	16
49	11	6
50	12	4
51	14	10
52	4	8
53	2	3
54	8	9
55	8	10
56	5	18
57	0	5
58	8	7
59	12	12
60	5	7
61	6	4
62	6	3
63	5	1
64	9	6
65	4	3
66	3	4

29	10	10
30	11	14
31	9	11
32	17	10
33	9	5
34	15	8
35	11	10
36	9	7

67	0	4
68	2	1
69	6	5
70	3	0
71	2	3
72	4	0
73	2	1
74	5	7
75	13	8
keatas		
jumlah	716	642
Total	1358	

2. Mutasi Penduduk

N O	DATAN G	PINDAH	LAHIR	MENINGGA L
1	23	7	24	11

3. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus berkembang kejenjang lebih tinggi, dengan hasil capaian dalam tahun 2014, yang lulus dari jenjang tingkatan pendidikan sebagai berikut:

Tamatan terakhir

N O	SD	SLTP	SLTA	DIPLOMA	S1	S2
1	341	189	118	10	31	2

4. Penyebaran Penduduk di masing-masing Dusun:

DUSUN	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH KK
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
GUGUAK PALAM	238	223	87
TIGO TINGKA	195	161	96
SIMOTUANG	128	94	59
KOTO TUO	155	164	118
JUMLAH	716	642	360

5. Jumlah penduduk menurut angka Angkatan kerja

Tenaga kerja	laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
Usia 18 – 56 yang bekerja	381	354
Usia 18 – 56 yang belum/tidak bekerja	29	43

Usia 56 tahun ke atas	105	100
-----------------------	------------	------------

6. Mata pencaharian pokok penduduk menurut angka usia kerja

No	Jenis Pekerjaan	jumlah (orang)
1	Petani	87
2	Buruh tani	32
3	PNS	20
4	Pensiunan	4
5	TNI /POLRI	3
5	Karyawan Swsta	10
6	Montir	8
7	Sopir	6
8	Tukang Bangunan	28
9	Tukang jahit	2
10	Tenun songket	176
10	Pedagang	
11	Pembatu Rumah tangga	26

7. Prasarana dan Sarana Sosial

No	Jenis	Jumlah	Ket
1	Masjid	1	
2	Surau	9	
3	Poskesdes	1	
4	TK	1	Yayasan
5	Paud	3	
6	Tsanawiyah	1	Yayasan
7	SD	2	Negeri
8	Mas	1	Yayasan
9	Lapangan Bola kaki	1	
10	Lapangan Badminton	3	
11	Lapangan Takraw	2	

8. Kepemilikan Jaminan kesehatan masyarakat

No	Jenis jaminan	Jumlah	Ket
1	BPJS	814	
2	JPKM	229	
3	ASKES	72	
4	Tidak memiliki jaminan	243	
	Jumlah	1358	

9. Pemamfaatan sumber air bersih

No	Jenis	Jumlah kk	ket
1	Mata Air	187	Baik
2	PAM(Pamsimas)	124	Baik
3	Depot isi ulang	49	Baik
	Jumlah	360	

10. Prasarana Penerangan

N O	JENIS	JUMLAH kk
1	PLN	354
2	Genset Pribadi	3
3	Lampu minyak tanah	3
Jumlah		360

2.1.3 Keadaan Ekonomi

a. Potensi unggulan Desa

1) Industri

Sektor industri yang dimaksud adalah industri rumah tangga dalam bentuk Bertenun songket secara perorangan dan kelompok dan usaha ini telah berkembang pesat dari tahun ketahun dan sangat berkontribusi terhadap pendapatan keluarga. Disamping industri tenun songket juga ada usaha Membuat kerupuk ubi dan makanan ringan lainnya, sebagai gambaran pendapatan keluarga dari sektor ini sebagai berikut:

Jenis industri	Jmlh	Biaya		Total nilai produksi(Rp)	Ket
		Bahan baku(Rp)	Rata-rata produksi		
Tenun songket	176 Buah	100.000./ helai	8 helai/Bln	323.840.000.	
kerupuk ubi					
Sapu Ijuk					

2) Pertanian dan Perkebunan

Komoditi sektor perkebunan yang berupa tanaman Kakao, karet, durian, manggis dan pala adalah merupakan usaha produktif masyarakat yang memberikan sumber tambahan pendapatan keluarga dan hanya sebanyak 3% (8 KK dari 359 dari total jumlah Kepala Keluarga yang ada) yang tidak memiliki lahan dan tanaman perkebunan. Dari segi pemasaran tidaklah menjadi kendala karena cukup banyak pedagang pengumpul yang tersedia di Desa dan sekitarnya serta harga yang menjanjikan.

Disisi lain pertanian padi sawah dan tanaman palawija lainnya juga menjadi salah satu kegiatan pertanian yang ditekuni oleh sebahagian masyarakat sebagaimana data luas sawah yang ada sebanyak 41.5 Ha dan dari jumlah tersebut sudah hamir senmuanya memiliki irigasi teknis dan para petani sudah tergabung kedalam kelompok tani sebanyak 6 kelompok, dari kelompok tani tersebut juga memiliki organisasi kelompok induk Gabungan Kelompok Tani(Gapoktan) Pandan Bajurai yang dibentuk pada tahun 2013 serta telah mendapatkan bantuan modal untuk anggota yang dikelola oleh Lembaga

Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) yang telah mempunyai badan hukum dan alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan lancar dan sangat membantu para anggotanya dalam memenuhi kebutuhan modal usaha pertanian untuk pengadaan bibit, Pupuk dan kebutuhan lainnya.

3) Peternakan

Sektor peternakan tidaklah begitu bisa dikembangkan yang disebabkan kondisi alam Desa yang tidak begitu mendukung, namun dari data terakhir masyarakat secara umum tetap memelihara ternak seperti Ayam kampung, Itik, kambing, Sapi dalam skala kecil dan sektor ini juga berkontribusi dalam menunjang pendapatan tambahan bagi masyarakat Desa serta bisa digambarkan kepemilikan ternak sebagai berikut;

No	Jenis ternak	Jumlah	ket
1	Ayam kampung	525	
2	Itik	21	
3	Kambing	18	
4	Sapi	72	

4) Perikanan

Sektor perikanan merupakan usaha sampingan bagi sebahagian Keluarga yang memiliki lahan untuk membuat kolam dan hanya..... Kepala Keluarga yang memilikinya, Pemerintah Kota telah menyediakan Bibit ikan gratis kepada masyarakat berdasarkan rekomendasi dari pihak Pertanian/Peternakan berdasarkan luas kolam masyarakat.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Sesuai dengan kondisi Desa yang merupakan daerah Agraris maka struktur ekonomi dominan dan bertumpu kepada sektor pertanian dan perkebunan serta sektor industri rumahan bagi para ibu rumah tangga atau kaum perempuan pada umumnya seperti usaha Tenun songket yang hingga saat ini cukup berkembang dengan pesat dengan dukungan penuh pemerintah kota dalam bidang promosi dan pengembangan motif yang selalu di bina oleh dinas terkait.

2. Pencegahan dan penanggulangan bencana

Sebagaimana kondisi Desa Lunto Timur yang secara umum berada pada pebukitan dan kemiringan yang begitu curam dan hanya beberapa kawasan saja yang lumayan datar, maka sangat berpotensi sekali terjadinya bencana alam seperti longsor sehingga setiap awal datangnya musim hujan kami selalu menghimbau dan mengingatkan melalui kepala Dusun agar masyarakat yang bertempat tinggal pada kawasan rawan bencana untuk memperhatikan saluran /Riol disekitar rumah masing-masing untuk bisa tersalurkan dengan aman dan tidak membahayakan bagi rumah yang lain. Dan selama tahun

2014 alhamdulillah boleh dikatakan tidak ada bencana longsor yang begitu parah, namun ada longsor dalam skala kecil dan dapat diatasi oleh masyarakat setempat dengan cara bergotong royong.

3. Penyelenggaraan ketertiban umum / Kamtibmas

Dalam tahun berjalan 2014 Desa Lunto Timur bisa dikatakan cukup kondusif dan tidak ada permasalahan kriminal dan sengketa lainnya yang sampai ditangani oleh aparat penegak hukum, hanya saja ada satu kasus perkelahian sesama keluarga dan kasus itupun dapat diselesaikan dengan pendekatan keluarga dengan memanfaatkan lembaga adat yang ada bersama pemerintah Desa sehingga bisa diselesaikan dengan sistim berdamai. Hal ini bisa di terjadi karena

semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan hukum dan peraturan yang ada.

DAFTAR NAMA ANGGOTA LINMAS DESA LUNTO TIMUR TAHUN 2014

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGA N
1	Hefrianto	Dusun Tigo Tingka	
2	Maidahlil	Sda	
3	Adi Vitoria	Sda	
4	Darmilis	Sda	
5	Adrianto	Dusun Guguk Palam	
6	Roma Sartika	Dusun Koto Tuo	
7	Agusman	Dusun Koto Tuo	
8	Rapius	Sda	
9	Dasril	Dusun Simotung	
10	Darmawan	Sda	

DAFTAR NAMA ANGGOTA PHBN TAHUN 2014

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGA N
1	GUSRIAL	DUSUN KOTO TUO	
2	YASIR ARAFAT	DUSUN SIMOTUNG	
3	BUDIMAN	DUSUN TIGO TINGKA	

DAFTAR NAMA POLMAS TAHUN 2014

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGA N
1.	HENDRA SUKMA	DUSUN KOTO TUO	

2	YUHELMI	DUSUN	TIGO	
		TINGKA		

2.2 Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1 Pembagian Wilayah

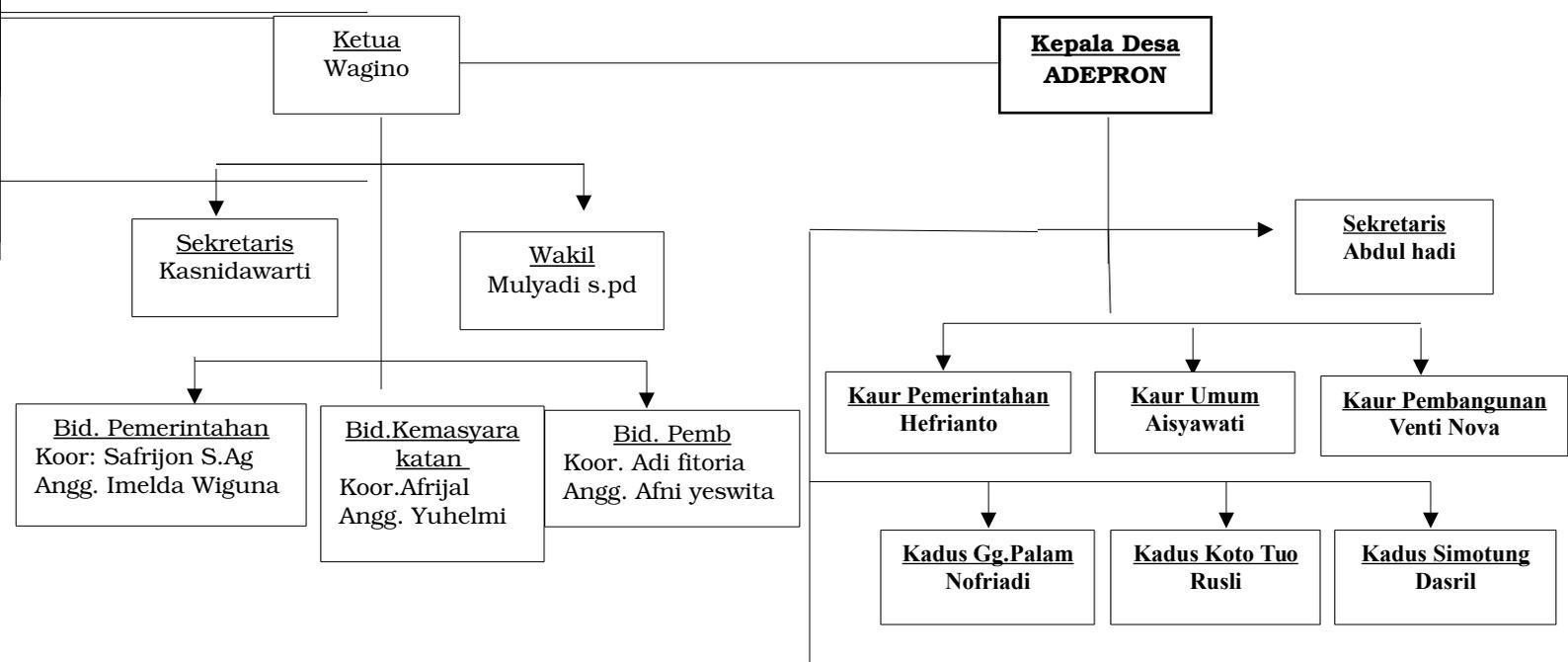
Desa Lunto Timur dibagi atas 4 (empat) Dusun yaitu :

- a. Dusun Tigo Tingka
- b. Dusun Koto Tuo
- c. Dusun Guguk Palam
- d. Dusun simotung

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Menganut system kelembagaan Pemerintah Desa dengan pola 3 Kepala Urusan , selengkapny sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



**Kadus Tg. Tingka
Darmilis**

BAB III MASALAH DAN POTENSI

3.1 MASALAH DAN POTENSI

POTENSI DAN MASALAH

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
NO	MASALAH	POTENSI/SASARAN
1	Belum jelasnya batas administratif desa	Pembangunan gerbang masuk permanen Desa Lunto Timur
2	Penyusunan perencanaan pembangunan desa masih terkendala dengan data data desa	Adanya dokumen data yang up date

3	Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan pembangunan desa belum tertata sebagaimana mestinya	Adanya dokumen tata ruang desa
4	Tingkat partisipasi masyarakat dan rasa peduli terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dirasa masih kurang	Memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan
5	Informasi sering terlambat dan tidak sampai kepada masyarakat / warga desa	Adanya pengelolaan informasi desa yang terorganisir
6	Perencanaan pembangunan desa masih belum melibatkan masyarakat banyak	Timbulnya rasa memiliki terhadap hasil pembangunan desa oleh masyarakat
7	Belum semua lapisan masyarakat mengetahui perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa	Berjalannya kontrol dari masyarakat atau pihak terkait terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa
8	Hubungan kerjasama antar desa hingga saat ini masih kurang	Peningkatan hubungan silaturahmi antar desa tetangga
9	Sarana penunjang pelayanan di kantor desa lunto timur kepada masyarakat masih kurang	Terwujudnya pelayanan yang prima dan memuaskan
BIDANG PEMBANGUNAN PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN		
1	Tingkat perkembangan peningkatan perekonomian masyarakat Desa Lunto Timr masih terkendala oleh terbatasnya kualitas infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya taraf perekonomian masyarakat 2. Lancarnya transportasi 3. Terbukanya pemukiman baru 4. Terbukanya lahan pertanian baru
2	Belum maksimalnya sarana dan prasarana kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
3	Belum maksimalnya sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya SDM Masyarakat 2. Mengurangi angka pengangguran
4	Belum maksimalnya usaha ekonomi produktif masyarakat serta belum adanya atau belum termanfaatkannya sarana dan prasarana ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terseratnya tenaga kerja di desa 2. Meningkatkan hasil panen petani 3. Berkembangnya usaha UMKM

5	Masih kurang kesadaran masyarakat akan lingkungan hidup	Terwujudnya lingkungan yang bersih dan tidak tercemar
BIDANG KEMASYARAKATAN		
1	Belum maksimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan	Meningkatnya kinerja semua lembaga yang ada
2	Belum maksimalnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Meningkatnya KMTIBMAS di Desa Lunto Timur dan meningkatnya wawasan masyarakat di bidang Hukum
3	Kurangnya kegiatan keagamaan	Terwujudnya masyarakat yang religius
4	Masih Kurangnya sarana dan prasarana olahraga	1. Meningkatnya prestasi olahraga dikalangan generasi muda 2. Tersalurnya bakat generasi mudah
5	Masih minimnya pembinaan terhadap lembaga lembaga adat	Meningkatnya peran lembaga adat di tengah masyarakat
6	Masih kurangnya pembinaan terhadap kesenian dan sosial budaya masyarakat	Terciptaya rasa cinta terhadap budaya dan kesenian lokal
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
1	masih kurangnya pelatihan peatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan	1. meningkatkan pendapatan masyarakat 2. Berkembangnya UMKM 3. Meningkatnya uSDM Pelaku UMKM
2	Masih minimnya pelatihan teknologi tepat guna kepada masyarakat	Meningkatkan pendapat dan meningkatnya usaha masyarakat
3	Masih rendahnya SDM Aparatur Pemerintahan Desa	Terciptanya Aparatur pemerintahan yang kompeten di bidangnya masing masing
4	Masih kurangnya pembinaan terhadap kader- kader dan kelompok kelompok masyarakat	Meningkatnya SDM Kader dan berkembangnya usaha kelompok

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 VISI

Visi yang merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Visi ini diambil dari Visi dan Misi Kepala Desa Lunto Timur yang terpilih periode 2012 – 2018. Dan visi ini juga telah mendapat persetujuan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa, perempuan dan masyarakat desa pada umumnya. Maka itu atas pertimbangan berbagai pihak maka visi Desa Lunto Timur adalah :

**“ TERCIPTANYA PELAYANAN TERBAIK DAN TERDEPAN DALAM SEGALA
BIDANG “**

4.1.2 MISI

Selain visi penyusunan misi juga telah ditetapkan, yang memuat misi-misi sebagai berikut :

1. Menciptakan aparatur pemerintah yang jujur dan bersih serta beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
2. Menciptakan aparatur yang memahami TUPOKSI sebagai pelayan masyarakat.
3. Menggali potensi yang dimiliki Desa.
4. Menyalurkan bakat dan potensi yang bisa dikembangkan yang dimiliki warga
5. Menghidupkan/menfasilitasi setiap organisasi dan perkumpulan yang bernilai positif atau bermanfaat untuk masyarakat.
6. Menampung setiap ide dari masyarakat untuk kemajuan Desa
7. Mempererat kerjasama antara pemerintah, Alim Ulama, Ninik Mamak.
8. Mengutamakan musyawarah untuk semua kebijakan/keputusan yang akan dilaksanakan.

BAB V PENUTUP

Demikianlah RPJMD Desa Lunto Timur ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Lunto Timur Kecamatan Lembah Segar tahun 2015 -2020 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa.

KEPALA DESA LUNTO TIMUR

ADEPRON

LAMPIRAN : PERATURAN DESA LUNTO TIMUR

NOMOR

TANGGAL : FEBRUARI 2015

NASKAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM Desa)

TAHUN 2015 - 2020

RPJM Desa

DESA LUNTO TIMUR
KECAMATAN LEMBAH SEGAR
KOTA SAWAHLUNTO